

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang, dengan berbagai macam masalah sosial yang masih dihadapi hingga saat ini. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang masih membelenggu di Indonesia. Ambang batas garis kemiskinan pada Maret 2022 meningkat 4,0% menjadi Rp 505.469 dari sebelumnya Rp 486.168 pada September 2021. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global yang berarti kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang di dunia. Walaupun tidak dikatakan seluruhnya, dengan jumlah yang berbeda-beda tingkat dan jumlah orang miskin pada setiap negara, hampir tidak ada satu negara yang dapat terbebas dari masalah kemiskinan.

Menurut Kuncoro (2000) dalam Akhmad (2021:175) kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang atau daerah tidak dapat meningkatkan kehidupan yang lebih layak atau dapat dikatakan tidak dapat meningkatkan standar hidup yang lebih baik.

Kondisi kemiskinan dengan dimensi dan implikasinya, merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menggambarkan kondisi kesejahteraan yang rendah. Masih banyak sekali rakyat yang hidup dibawah garis kemiskinan dan hidup dalam keadaan yang tidak selayaknya. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi fokus dan perhatian utama pemerintah Indonesia. Kemiskinan menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak mampu dalam memenuhi hak-hak dasarnya, seperti tidak terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan perumahan, air bersih, sumber daya alam, dan lingkungan.

Oleh sebab itu, kemiskinan merupakan isu strategis untuk diangkat dalam melakukan perubahan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena cita-cita atau kondisi yang diinginkan masyarakat adalah terwujudnya kehidupan yang sejahtera dan kemiskinan harus bisa ditanggulangi. Masyarakat miskin menjadi kekurangan dan tidak mampu dalam menghadapi perkembangan di jaman globalisasi saat ini. Dengan adanya kemiskinan maka dapat menghambat tujuan dan cita-cita negara.

Kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Kesejahteraan sosial dan keberfungsian sosial dapat direalisasikan melalui usaha yang terencana, sistematis dan berkelanjutan serta melembaga dalam

bentuk pelayanan sosial. Berbagai terminologi digunakan untuk menjelaskan usaha yang terencana tersebut. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan bidang perlindungan sosial, pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 telah menerbitkan Program Keluarga Harapan (PKH) seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (9) UU No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menentukan bahwa: “Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial”.

Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan non-tunai kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program keluarga harapan merupakan program yang berbasis keluarga miskin, sehingga menjadi sasaran utama adalah keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. Program Keluarga Harapan (PKH) juga salah satu program prioritas nasional yang dijadikan oleh Kementerian Sosial dalam menanggulangi kemiskinan secara kontinu. Program ini dalam jangka pendek bertujuan untuk mengurangi beban keluarga miskin dan dalam jangka Panjang

diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan Kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan Pendidikan (fasdik) yang tersedia. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan manfaat pelayanan sosial dasar Kesehatan, Pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. (<https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>)

Kemiskinan sangat tinggi di beberapa kecamatan di Banyuwangi. Beberapa wilayah termasuk Cluring, Genteng, Muncar, Sempu, Kabat, Rogojampi, Srono, Singojuruh, Bangorejo, dan Wongsorejo. Dalam rencana pembangunan ke depan, pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus memberikan perhatian khusus pada beberapa kecamatan ini.

Kecamatan Cluring merupakan salah satu kecamatan yang tergolong rumah tangga miskin. Kecamatan Cluring memiliki luas 67,30 km² dan memiliki 71.077 penduduk. Kepala BPS Banyuwangi menyampaikan,

untuk angka kemiskinan di Banyuwangi tahun 2021 naik menjadi 8,07 persen. Sementara angka pengangguran dari 5,34 persen di tahun 2020 menjadi 5,42 persen di tahun 2021.

Tabel 1.1
Jumlah Penerima PKH Tahun 2022

| No | Desa | Jumlah |
|----|--------------|--------|
| 1 | Benciluk | 575 |
| 2 | Sembulung | 423 |
| 3 | Cluring | 406 |
| 4 | Tampo | 346 |
| 5 | Plampangrejo | 317 |
| 6 | Sraten | 303 |
| 7 | Tamanagung | 200 |
| 8 | Kaliploso | 149 |
| 9 | Sarimulyo | 25 |

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi

Tercatat bahwa Kecamatan Cluring terbagi Sembilan desa terdiri dari Kecamatan Cluring. Desa-desa ini adalah Sembulung, Tampo, Plampangrejo, Kaliploso, Benciluk, Cluring, Tamanagung, Sragen, dan Sarimulyo. Di Kecamatan Cluring, setiap desa memiliki jumlah penduduk miskin yang terdaftar di Program Keluarga Harapan. Desa Benciluk 575 orang, Sembulung 423 orang, Cluring 406 orang, Tampo 346 orang, Plampangrejo 317 orang, Sragen 303 orang, Tamanagung 200 orang, Kaliploso 149, dan di Sarimulyo 25 orang. Penduduk yang mendapatkan PKH paling tinggi adalah desa Benciluk dan yang paling rendah berada di Desa Sarimulyo.

Tabel 1.2

**Jumlah Penerima PKH Berdasarkan Kategori di Kecamatan Cluring
Tahun 2021**

| No | Kategori | Jumlah Penerima |
|----|----------------|-----------------|
| 1 | Anak Usia Dini | 338 |
| 2 | Disabilitas | 42 |
| 3 | SD | 1.112 |
| 4 | SMP | 756 |
| 5 | SMA | 600 |
| 6 | Ibu Hamil | 10 |
| 7 | Lansia | 960 |

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi

Dari data diatas dapat dilihat bahwa kategori yang paling besar mendapatkan PKH adalah bidang Pendidikan tingkat SD dimana KPM yang mendapatkan bantuan ada 1.112 orang dan di Kecamatan Cluring sendiri ada 41 Sekolah Dasar (SD) banyaknya.

Sebagian besar masyarakat yang tinggal di Kecamatan Cluring bekerja sebagai petani atau buruh, dan banyak dari mereka masih pengangguran dan para ibu ada yang menjadi tulang punggung keluarga yang pendapatannya masih rendah. Gaya hidup masyarakat di Kecamatan Cluring adalah konsumtif yang sangat tinggi. Mereka suka menghabiskan uang untuk berbelanja, bersenang-senang, dan lain sebagainya. Uang yang mereka keluarkan tidak sebanding dengan pekerjaan masyarakat di Kecamatan Cluring, hal ini yang menyebabkan kebutuhan masyarakat meningkat dan pendapatan mereka tidak bisa sepadan. Bahkan banyak masyarakat yang mendapatkan program

bantuan dari PKH ini hanya bergantung pada bantuan itu. Dengan adanya ketergantungan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap bantuan PKH, maka diadakannya Program Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) supaya para KPM yang hanya bergantung pada bantuan bisa mengelola bantuan tersebut dengan baik. Program ini dilakukan untuk memberikan pelatihan kepada KPM PKH.

Agar masyarakat yang menerima bantuan tidak bergantung pada bantuan saja tetapi mereka diberikan pelatihan untuk berwirausaha dan lain sebagainya. Setiap kelompok KPM ada ketuanya masing-masing dan mengadakan pertemuan dan diskusi rutin setiap satu bulan sekali yang didampingi oleh pendamping PKH. Pertemuan kelompok merupakan kegiatan rutin yang difasilitasi oleh pendamping sosial untuk pelaksanaan tugas yang bersifat administratif dan edukasi dengan memberikan informasi terkait tata tertib dan aturan PKH, serta akses terhadap layanan Kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan KPM.

Dengan hadirnya Program Keluarga Harapan ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah sangat terbantu dengan hadirnya program-program yang dilaksanakan oleh PKH, seperti contohnya orang tua terbantu dalam memenuhi kebutuhan gizi untuk bayinya, anak-anak bisa bersekolah Kembali yang dulunya sempat putus sekolah akibat ketidakmampuan biaya yang harus dikeluarkan dan untuk orang tua yang sudah lanjut usia sudah mendapat perhatian dengan hadirnya PKH.

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dilapangan saat mengimplementasikan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan yaitu Ketika pihak pendamping mengarahkan atau memberi pelatihan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar mau mengikuti prosedur ataupun aturan yang harus diikuti, KPM harus mau memenuhi kewajiban dan hak sebagai peserta penerima manfaat dari program P2K2 PKH, terkadang masih ada Sebagian masyarakat yang bandel dan hanya mengiyakan saja tanpa benar melaksanakan sesuai perintah serta arahan yang telah dijelaskan dari pendamping PKH.

Seperti para pendamping mengarahkan untuk keluarga penerima manfaat selalu mengingatkan dan mengantar anak pergi ke sekolah tetapi banyak di lapangan ditemukan anak yang malas pergi ke sekolah, anak yang tidak lengkap atribut sekolah itu merupakan tanggung jawab orang tua dan masih ada juga masyarakat yang malas pergi ke posyandu, bahkan ada peserta KPM lansia yang malas untuk pergi ke fasilitas Kesehatan. Ketika pertemuan rutin para pendamping selalu bertanya dan mengingatkan apakah para keluarga penerima manfaat sudah melaksanakan tugas yang harus mereka lakukan dan para peserta KPMpun mengiyakan. Tetapi Ketika waktu verifikasi tiba para pendamping PKH tersebut mengecek ke sekolah tetapi masih banyak anak yang bolos ke sekolah, Bahkan masih banyak orang tua yang tidak mengantarkan anak ke posyandu.

Selain permasalahan di atas dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan juga masih sering ditemui Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan adalah keluarga yang mampu dan masih banyak keluarga miskin yang belum mendapat bantuan atau sering disebut salah sasaran dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Padahal Program Keluarga Harapan ini ditujukan untuk keluarga miskin.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut untuk melakukan pemantauan melalui Implementasi Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan Tingkat SD di Kecamatan Cluring dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan juga penghambat dalam mengimplementasikan Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan Tingkat SD di Kecamatan Cluring.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan Tingkat SD (Studi di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang didapat adalah:

1. Bagaimana implementasi penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan Tingkat SD Menurut Petunjuk Teknis No. 13 Tahun 2022 di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan Tingkat SD Menurut Petunjuk Teknis No. 13 Tahun 2022 di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti tersebut, maka peneliti menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana implementasi dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan Tingkat SD Menurut Petunjuk Teknis No. 13 Tahun 2022 di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan Tingkat SD

Menurut Petunjuk Teknis No. 13 Tahun 2022 di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat memberikan informasi dan wawasan yang mampu menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang implementasi penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bidang Pendidikan tingkat SD

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan ataupun menjadi referensi bagi pemerintah khususnya di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi dalam memberikan penyaluran bantuan PKH dan meningkatkan kualitas kehidupan secara menyeluruh di lingkungan Kecamatan Cluring.

- b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai implementasi penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan studi perbandingan untuk penelitian selanjutnya.